

# PERILAKU MENYIMPANG DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

Oleh: Suyato

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta

## Abstrak

*Discourse of deviant behavior becomes difficult because of its complexity and relativity. Its complexity stems from the facts that there are many concepts should be considered, namely medical concepts, legal aspects, and morals issues. Its relativity comes from the facts that there are many perspectives, such as cross-cultural perspectives, subculture variations, ecological context, variation over time, and situational aspects. Sociologists have been made explanation on deviant behavior but not yet comprehensive.*

*Sociological perspectives on deviant behavior can be categorized as structural functional theory, symbolic interaction theories, and conflict theory. Each of them tries to explain major question, basic assumption, and causes of deviance by using its own perspective. For example, control theory has been emphasis that because the lack of strong tied (legal or social) from others, individual tends to conduct defiantly. Sociologists also has been tried to comprehend ways people neutralize their misbehavior.*

*Using economic perspective and control theory to eliminated corruption conducted by apparatus in district development program as an example, this article concluded that it is needed to make a comprehensive perspective in solving deviant behavior problems, such as corruption.*

**Kata Kunci:** *perilaku menyimpang, perspektif sosiologis.*

## Pendahuluan

Pembicaraan tentang penegakan hukum sangat terkait dengan perilaku menyimpang, baik yang dilakukan oleh orang awam maupun oleh penegak hukum sendiri. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang perilaku menyimpang akan sangat membantu upaya penegakan hukum, khususnya dalam usaha yang bersifat preventif.

Yang menjadi masalah, di samping masalah kompleksitas mengenai perilaku menyimpang, ada nuansa relativitas ketika menentukan mana perilaku yang menyimpang, mana yang bukan. Kompleksitas masalah perilaku menyimpang misalnya menyangkut *medical concepts, legal concepts, dan moral issues* (Schur, 1979:18-25). Sedangkan relativitas masalah perilaku menyimpang antara lain karena adanya tinjauan dari berbagai aspek, seperti *cross-cultural perspectives, subcultural variations, ecological contexts, variation over time, dan situational deviance* (Schur, 1979:74-96). Goode mengemukakan bahwa relativitas perilaku menyimpang bisa disebabkan oleh faktor *audience, actor, dan situational* (Goode, 1984: 14-16).

Tulisan singkat ini akan memaparkan masalah perilaku menyimpang dari perspektif sosiologis dan sebuah contoh aplikasinya dalam upaya mengurangi peluang untuk korupsi dalam Program Pembangunan Kecamatan di Indonesia yang dilakukan Bank Dunia.

## Pengertian Perilaku Menyimpang

Secara mendasar, ada tiga perspektif untuk menentukan apakah perilaku menyimpang itu, yaitu *absolutist, normative, dan reactive* (Goode, 1984:7). Perspektif *absolutist* berpendapat bahwa kualitas atau karakteristik perilaku menyimpang bersifat instrinsik, terlepas dari bagaimana ia dinilai. Dengan kata lain, perilaku menyimpang ditentukan bukan dengan norma, kebiasaan,

atau aturan-aturan sosial. Perspektif *normative* berpendapat bahwa perilaku menyimpang bisa didefinisikan sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat (Cohen, 1992: 218). Dengan demikian, sebuah tindakan dikatakan menyimpang atau tidak, ditentukan oleh batasan-batasan norma kemasyarakatan atau budaya. Sedangkan perspektif *reactive*, perilaku menyimpang dapat ditemukan dalam bagaimana secara aktual ia dinilai. Untuk dikualifikasikan sebagai penyimpangan, sebuah tindakan harus (1) diamati atau paling tidak didengar, dan (2) menyebabkan hukuman yang nyata bagi pelakunya. Kunci utamanya adalah *concrete social disapproval toward specific actions and actors*.

Perspektif *reactive* memiliki beberapa kelemahan (Goode, 1984:9-10):

*First: It ignore secret behavior that would be reacted to as deviance, were it known to the community...*

*Second: It ignore secret behavior that would be reacted to as deviance, even where the actor knows that it would be condemned by the community...*

*Third: It denies the possibility that there is any predictability in the reactive process...*

*Fourth: It ignores the reality of victimization.*

Perilaku menyimpang bisa dilakukan secara individual atau kelompok. Seseorang yang mengemis merupakan penyimpangan individual, tetapi bila mayoritas warga sebuah desa menjadi pengemis, maka penyimpangan ini merupakan penyimpangan kelompok.

### **Perspektif Sosiologis tentang Perilaku menyimpang**

Berkaitan dengan perilaku menyimpang tersebut, teori-teori sosiologi, baik yang termasuk dalam kategori klasik maupun modern, telah memberi penjelasan yang cukup memadai untuk dijadikan pijakan kita dalam rangka memahami sebab-sebab terjadinya perilaku menyimpang. Dimulai dari Durkheim dengan konsepnya *anomie*, suatu situasi tanpa norma dan arah yang tercipta akibat tidak selarasnya harapan kultural dengan kenyataan sosial. Selanjutnya, Merton mencoba menghubungkan *anomie* dengan penyimpangan sosial. Ia berpendapat bahwa sebagai akibat proses sosialisasi, individu belajar mengenal tujuan-tujuan penting kebudayaan dan sekaligus mempelajari cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut yang selaras dengan kebudayaan. Apabila kesempatan untuk mencapai tujuan tidak ada atau tidak mungkin, dan individu-individu mencari alternatif, perilaku alternatif itu bisa berupa penyimpangan sosial. Merton menyebutkan ada 4 (empat) perilaku menyimpang, yaitu inovasi (*innovation*), ritualisme (*ritualism*), penebusan diri (*retreatism*), dan pemberontakan (*rebellion*).

Yang dimaksud inovasi adalah perilaku seseorang yang menerima tujuan secara budaya tetapi menolak cara-cara yang diterima masyarakat. Dalam pengertian ini, merampok merupakan perilaku inovasi, karena menolak bekerja keras dan memilih merampok untuk kaya. Mengganti cara (kerja keras dengan merampok) merupakan sebuah inovasi. Tentu saja sebuah inovasi yang negatif. Dalam bidang hukum, anggota masyarakat menolak menempuh jalur hukum dan memilih main hakim sendiri. Perilaku ini juga termasuk inovasi.

Ritualisme terjadi manakala seseorang menerima cara-cara yang diperkenankan secara kultural tetapi menolak tujuan-tujuan kebudayaan. Seorang mahasiswa yang mengikuti upacara atau senam kesegaran jasmani dengan tujuan untuk mendapatkan beasiswa, bukan agar sehat, merupakan contoh perilaku ritualisme. Dalam bidang hukum, seorang pengendara sepeda motor memakai helm bukan demi keselamatan tetapi takut mendapatkan "tilang" atau bukti pelanggaran, merupakan contoh ritualisme.

Pengasingan diri (*retreatment*) terjadi jika seseorang menolak baik cara-cara maupun tujuan yang diperkenankan secara budaya tanpa menggantinya dengan yang baru.

Pemberontakan terjadi manakala seseorang menolak baik cara-cara maupun tujuan yang diperkenankan secara budaya dengan menggantikannya dengan yang baru.

Secara singkat, Brinkerhoff and White (1988: 128) merangkum tiga teori utama dalam sosiologi dalam menjelaskan masalah perilaku menyimpang, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

<b>RAGAM TEORI</b>	<b>PERTANYAAN UTAMA</b>	<b>ASUMSI DASAR</b>	<b>PENYEBAB PERILAKU MENYIMPANG</b>	<b>Sangat Berguna untuk Menjelaskan perilaku menyimpang dari</b>
<b>Teori Struktural Fungsional</b>	Mengapa orang melanggar aturan?	Perilaku menyimpang merupakan karakteristik dari ketidaknormalan struktur sosial.	Adanya dislokasi antara tujuan dan sarana untuk mencapainya dalam masyarakat.	Kelas pekerja dan kelas bawah yang tidak mampu mencapai tujuan yang diharapkan dengan cara-cara yang dianjurkan.
<b>Teori-teori Interaksionisme Simbolik:</b> Teori Asosiasi Diferensial	Mengapa perilaku menyimpang lebih merupakan karakteristik suatu kelompok dibanding yang lainnya?	Perilaku menyimpang dipelajari, seperti perilaku sosial lainnya.	Nilai-nilai subbudaya berbeda dalam masyarakat yang kompleks; beberapa subbudaya menjunjung tinggi nilai-nilai yang mendukung penyimpangan. Ini semua dipelajari melalui sosialisasi.	Kelompok menyimpang ( <i>gangs</i> ) dan mereka yang tergabung dalam ketetangaan dan subbudaya menyimpang.
Teori Harga Diri ( <i>self-esteem theory</i> )	Mengapa beberapa orang memilih berperilaku menyimpang?	Peran perilaku menyimpang dilakukan jika peran itu meningkatkan harga diri ( <i>self-esteem</i> ).	Gagal untuk menghargai perilaku yang normal (wajar).	Mereka yang gagal dalam peran konvensional.
Teori Pengawasan ( <i>control theory</i> )	Apa yang menahan seseorang dari melanggar aturan?	Perilaku menyimpang adalah normal dan konformitas yang harus dijelaskan.	Tidak adanya ikatan yang kuat terhadap orang lain dan nilai-nilai serta aktivitas masyarakat.	Individu-individu yang kurang terikat dalam keluarga, ketetangaan, dan masyarakat (khususnya anak muda dari keluarga gagal ( <i>broken home</i> )).
Teori Pelabelan ( <i>labeling theory</i> )	Bagaimana tindakan dan orang mendapatkan label menyimpang?	Penyimpangan adalah relatif dan tergantung pada bagaimana orang lain memberi label terhadap orang	Orang-orang yang memiliki tindakan yang diberi label menyimpang dan mereka yang menerima label itu	Orang-orang yang tidak berdaya yang mendapat label menyimpang oleh individu-individu yang memiliki

		dan tindakan itu.	menjadi karir.	kekuasaan yang besar.
<b>Teori Konflik</b>	Bagaimana akses yang tidak sama terhadap sumberdaya yang terbatas mengarah pada perilaku menyimpang?	Penyimpangan merupakan respon yang normal terhadap kompetisi dan konflik terhadap sumberdaya yang terbatas.	Ketidakmerataan dan kompetisi.	Semua kelas. Kelas bawah didorong untuk berperilaku menyimpang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan untuk keluar dari frustrasi; kelas atas menggunakan perilaku menyimpang untuk mempertahankan hak-hak istimewa ( <i>privilege</i> ) mereka.

Di samping penjelasan tentang perilaku menyimpang, para sosiolog juga telah berhasil memaparkan model “justifikasi” tentang perilaku menyimpang. Sykes dan Matza, sebagaimana dikutip Schaeffer (1989: 325), menyatakan bahwa ada lima model justifikasi perilaku menyimpang, yang mereka sebut *techniques of neutralisation*. Kelima model itu adalah *denying responsibility*, *denying the injury*, *blaming the victim*, *condemning the authorities*, dan *appealing to higher principles or authorities*.

Cara pertama, berupa penolakan tanggung jawab. Banyak orang beralasan bahwa karena tekanan yang luar biasa seperti kemiskinan, terancam, kurang persiapan secara akademi, membuat mereka berperilaku menyimpang seperti mencuri, membunuh, menyontek. Dalam banyak kasus, seorang pelacur yang terkena razia sering beralasan karena tekanan ekonomi yang luar biasa beratnya menyebabkan mereka terjun ke dunia prostitusi.

Cara yang kedua, dengan alasan tidak adanya korban akibat perilaku menyimpang mereka, maka mereka menolak kalau perilaku mereka dikategorikan sebagai kriminal. Para remaja yang melakukan *vandalism*, para mucikari membuka rumah bordil, anak-anak muda mabuk-mabukan, dan sebagainya sering menggunakan alasan tidak adanya korban sebagai justifikasi perilaku mereka.

Cara ketiga, yaitu dengan cara menyalahkan korban juga sering kita temukan dalam banyak kasus kejahatan. Pelaku pemerkosa dengan santainya mengatakan bahwa mereka memperkosa seorang gadis karena gadis tersebut berpakaian mini yang mengundang nafsu syahwat pemerkosa tersebut.

Cara keempat, menyalahkan atau mengalihkan kesalahan kepada pihak yang berwenang, juga sering kita temukan dalam banyak kasus. Misalnya dalam ungkapan “kasihan ya si fulan, hanya karena mencuri seekor ayam, ia harus mendekam di penjara selama tiga bulan, sedangkan pejabat yang korupsi dan menyebabkan ia miskin (karena menggusur tempat jualan fulan) tidak tersentuh oleh hukum”. Ini adalah salah satu cara untuk menetralisasi atas perilaku menyimpang.

Cara yang terakhir, dengan mengaitkan prinsip yang lebih tinggi, juga sering kita temukan dalam banyak kasus. Banyak Pekerja Seks Komersial (PSK) yang berdalih untuk membiayai pendidikan anaknya, pencuri kambing yang berdalih untuk membantu biaya menikah sahabat karibnya, tawuran atas nama solidaritas teman, merupakan beberapa contoh usaha netralisasi perilaku menyimpang.

Sebagai gambaran bagaimana seseorang bisa *berdalih* ketika berperilaku menyimpang, perhatikan kutipan jawaban seorang pelacur ketika diwawancarai Bryan berikut ini:

*We girls see, like I guess you call them perverts of some sort, you know, little freaky people and if they didn't have girls to come to like us, that are able to handle them and make it a nice thing, there would be so many rapes and...nutty people really...*

*I could say that a prostitute has held more marriages together as part of their profession than any divorce counselor.*

*I don't regret doing it because I feel I help people a lot of men that come over for companionship, someone to talk to... a lot of them have problems (Schur, 1979: 301).*

### **Aplikasi Teori Kontrol: Kasus Pengawasan Program Pembangunan Kecamatan**

Kontrol sosial diartikan sebagai *"the forces and processes that encourage conformity, including self-control, informal control, and formal control"* (Brinkerhoff and White, 1989: 118). *Self-control* terjadi karena para individu menginternalisasikan nilai-nilai dan norma kelompok mereka. Dukungan yang kuat terhadap *self-control* diberikan oleh kontrol sosial yang bersifat informal. Jika dukungan ini tidak cukup mencegah perbuatan menyimpang, kontrol sosial yang bersifat formal akan bekerja. Dengan mendasarkan diri pada teori kontrol, Bank

Dunia menggunakan tujuh mekanisme untuk mengurangi peluang korupsi dalam proyek Program Pembangunan Kecamatan. Secara singkat, ketujuh mekanisme tersebut dapat dikemukakan dalam tabel berikut:

Penyederhanaan dan Kontrol Masyarakat	a. Dana ditransfer secara langsung. b. Tidak ada kontrol dari pemerintah lokal. c. Warga desa mengontrol anggaran. d. Bentuk keuangan disederhanakan sehingga masyarakat desa mudah memahaminya.
Sosialisasi	Warga desa belajar bagaimana proyek diharapkan berjalan, apa hak mereka, dan apa yang dilakukan jika mereka tidak puas.
Transparansi	a. Semua informasi keuangan dibuat publik dan ditayangkan secara publik di desa-desa. b. Informasi tentang pengaduan dipublikasikan di dalam surat kabar.
Monopoli Terbatas	Minimal tiga pengkuotaan disyaratkan untuk semua barang.
Diskresi Terbatas	Minimal tiga tanda tangan dibutuhkan untuk semua transaksi keuangan.
Mekanisme Akuntabilitas	Pertemuan desa secara teratur dilakukan untuk menghitung dana. Pengucuran bisa ditunda bila diindikasikan terjadi penyalahgunaan.
Monitoring dan Tindak-lanjut	a. Program menjamin pengawasan proyek secara teratur, jalur pengaduan, dan tindak-lanjut. b. Pengawasan independen dilakukan oleh masyarakat sipil dan wartawan.

(Bank Dunia, 2003: 194).

Dengan mencermati mekanisme yang digunakan Bank Dunia untuk mengurangi peluang melakukan korupsi tersebut di atas, nampak jelas bahwa teori yang digunakan lebih menekankan pada teori kontrol. Sesungguhnya, teori kontrol kurang memadai untuk memberantas korupsi. Perspektif lain perlu ditambahkan, misalnya perspektif sosiologi ekonomi yang akan diuraikan di bagian bawah ini.

### **Sebuah Perspektif Sosiologi Ekonomi Tentang Korupsi**

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang diharuskan untuk selalu mengambil sebuah keputusan atau pilihan. Sebuah pilihan tertentu akan dilakukan berdasarkan imbalan atau insentif. Dalam perspektif praktis, insentif itu bisa berupa hadiah atau imbalan keuntungan

dan hukuman atau kerugian. Akibatnya, sebagaimana teori ekonomi mengatakan, orang akan membandingkan antara *costs* and *benefits* sebelum keputusan itu diambil atau dilakukan. Jika keuntungan lebih besar dari kerugian, maka seseorang akan melakukan, demikian juga sebaliknya.

Korupsi merupakan salah satu contoh tindakan tertentu itu. Sebelum melakukannya, orang membandingkan antara keuntungan dan kerugiannya. Kita lihat pelayan publik di dalam birokrasi. Sebagaimana diketahui, para pelayan publik dalam birokrasi tidak dapat hidup “layak” dengan gaji yang pas-pasan atau bahkan rendah. Keuntungan dari korupsi menjadi jelas, yaitu menambah penghasilan. Bagaimana dengan kerugian atau *costs*? Karena *the rule of law* tidak ada atau tidak efektif, maka tidak ada yang perlu ditakutkan.

Oleh karena itu tidak mengherankan kalau korupsi begitu nyata di dalam praktik birokrasi semacam ini. Bagi para pelayan publik rendahan, korupsi menyangkut masalah kelangsungan hidupnya. Gaji mereka tidak mampu menopang pengeluarannya. Satu-satunya jalan, menurut mereka, adalah dengan melakukan korupsi. Karena mereka tidak memiliki harta benda atau inventaris yang dapat dijual, maka satu-satunya cara adalah melalui pelayanan mereka. Kewenangan mereka dalam melayani publik dijadikan jalan untuk korupsi. Akibatnya, orang harus membayar lebih untuk mendapatkan pelayanan dari mereka, misalnya untuk mendapatkan KTP atau SIM.

Tetapi korupsi juga terjadi pada pejabat level tinggi pada birokrasi dengan gaji yang relatif tinggi. Bagaimana kita menjelaskan masalah korupsi pada level ini? Sekali lagi, teori ekonomi mampu menjelaskannya. Teori ekonomi menjelaskan bahwa orang memiliki keinginan yang selalu tak terpuaskan. Ia membutuhkan lebih banyak barang, lebih banyak produk, dan karena itu lebih banyak uang untuk memenuhinya. Jika mereka memiliki peluang untuk mendapatkan uang lebih, mereka akan melakukannya. Ini adalah cara lain untuk mengatakan bahwa gaji yang besar tidak akan menghentikan korupsi, jika, sekali lagi hukuman atau kerugian dari korupsi yang akan diderita pelaku tidak ada karena tidak ada penegakan hukum.

Hal ini menjelaskan mengapa begitu sulit untuk memberantas korupsi di Indonesia. Rendahnya gaji dan tidak adanya penegakan hukum adalah akar dari korupsi. Pelayan publik rendahan, korupsi untuk survive, sementara kalangan atas korupsi untuk menjadi lebih kaya lagi. Di bawah kondisi semacam itu, melindungi satu sama lain menjadi perlu. Tidak ada keuntungan langsung dengan melaporkan koleganya terlibat dalam korupsi karena itu berarti membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hal ini menjelaskan bagaimana tidak efektifnya kotak surat pengaduan yang bersifat anonim terkait dengan korupsi. Tak satu pun orang akan menindaklanjuti pengaduan itu, karena sama saja dengan bunuh diri bersama.

Apa yang kemudian harus dilakukan? Mereformasi dan meningkatkan pelayanan pemerintahan adalah bagus tetapi tidak cukup. Kebijakan pemberantasan korupsi seharusnya mengadopsi pendekatan *reward and punishment*. Dari sudut pandang praktis, adalah tidak efektif jika memperketat hukuman tanpa diikuti usaha meningkatkan gaji atau pendapatan pegawai negeri, khususnya mereka yang bergaji rendah. Pemerintah baru mempunyai hak untuk menghukum setelah gaji pegawainya tinggi tetapi ternyata tetap korupsi.

Level hukuman seharusnya seiring dengan level pegawai itu. Pegawai negeri tingkat tinggi harus menerima hukuman yang lebih tinggi jika terbukti korupsi, demikian juga kalau melakukan kesalahan dalam melakukan tugasnya. Di sini, pendekatan religius dapat diterapkan, sebagaimana diusulkan NU, yaitu tidak perlu disholatkan jenasah koruptor. Hukuman atau resiko korupsi harus melebihi keuntungan yang didapat. Ini akan memberikan pesan yang jelas untuk berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk terlibat dalam korupsi.

Karena korupsi sudah demikian parahnya di negeri ini, usaha-usaha anti korupsi harus dilakukan. Pemerintah harus memulainya dengan mengimplementasikan strategi pada wilayah skala kecil, pada lingkup kecamatan misalnya, sebelum bergerak ke lingkup yang lebih besar, kabupaten atau propinsi. Perlu diingat bahwa memberantas korupsi bukanlah pekerjaan yang akan selesai semalam. Ini merupakan sebuah usaha yang butuh kesabaran, keteguhan, dan konsistennsi. Hanya jika pekerjaan ini telah selesai, berbagai peluang membalikkan situasi Indonesia ini dapat dilakukan.

Secara komprehensif, *The Economic Development Institute (EDI)* dari Bank Dunia telah memperkenalkan konsep yang disebut “*pillars of integrity*”, yang melibatkan 8 lembaga untuk memberantas KKN, khususnya korupsi. Kedelapan lembaga ini meliputi: (1) lembaga eksekutif; (2) lembaga parlemen; (3) lembaga kehakiman; (4) lembaga-lembaga pengawas; (5) media; (6) sektor swasta; (7) masyarakat sipil; dan (8) lembaga-lembaga penegakan hukum (Langseth, 1997).

## **Penutup**

Dalam menjelaskan fenomena perilaku menyimpang, para sosiolog cenderung menekankan pada penggunaan salah satu perspektif dan cenderung mengabaikan perspektif lainnya. Dalam rangka untuk memperoleh pemahaman yang komprehenisf dan dalam rangka turut serta berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan yang efektif, para pakar maupun masyarakat awam hendaknya berpandangan komprehensif. Penekanan pada salah satu teori dan cenderung mengabaikan teori yang lain akan membuat kita berpandangan picik dan berakibat pada pengambilan keputusan yang kurang efektif. Teori-teori sosiologi, baik klasik maupun kontemporer telah berusaha memaparkannya dengan cukup memadai, meskipun belum tuntas.

## **Daftar Pustaka**

- Bank Dunia, 2003. *Combating Corruption in Indonesia, Enhancing Accountability for Development.*(Report No. 27246-IND, November 12, 2003).
- Barlev Nicodemus, 2005, “An economic perspective of corruption”, in *The Jakarta Post*, Wednesday, April 6, 2005.
- Brinkerhoff, David B, and White, Lynn K., 1988, *Essentials of Sociology*, New York; West Publishing Company.
- Cohen, Bruce J., 1992, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Goode, Erich, 1984, *Deviant behavior, second edition*. New Jersey: Prentice Hall.
- Klitgarard, Robert, 2002, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Langseth, Petter, Stapenhurst, R., Pope, J., 1997, “The role of National Integrity System in Fighting Corruption”, *EDI Working Paper*, The Economic Development Institute of the World Bank.
- Schaefer, Richard T, 1989, *Sociology*, New York: McGraw-Hill. Inc.
- Schur, Edwin M., 1979, *Interpreting deviance a sociological introduction*. New York: Harper& Row Publishers.